

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan Tesis pada Bab ini, akan diawali dengan Pendahuluan yang akan membahas mengenai sejarah awal kedekatan hubungan Turki dan Israel, juga pembahasan secara singkat tentang isi, juga berisi rambu-rambu untuk masuk pada bab selanjutnya. Pada Bab pendahuluan akan membahas tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, literatur review, landasan teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan juga sistematika penulisan yang akan menjelaskan arah tesis yang akan dibahas penulis. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada beberapa sub-bab berikut.

A. Latar Belakang Masalah

Adalah Suatu penyimpangan dari para ilmuwan sosial untuk mengasumsikan eksistensi pola perilaku yang teratur, untuk menjelaskan hal itu dalam kaitannya dengan variabel yang khas, dan untuk menggunakan data sejarah guna menggambarkan suatu generalisasi yang mereka coba buat. Para mahasiswa politik internasional berusaha memahami dan menjelaskan sebab dan hakikat perang, imperialisme, eskalasi, krisis, atau persekutuan tanpa harus menggambarkan setiap perang, imperialisme, eskalasi, krisis dan persekutuan dalam sejarah. Suatu generalisasi yang sah (valid) adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan semua peristiwa dalam kelas tertentu. Setiap pernyataan umum tentang gejala ini tentu saja harus didasarkan pada pengamatan sejarah yang akurat, tetapi para sarjana ilmu sosial masih lebih banyak menaruh perhatian pada kelas atau pengelompokan gejala daripada rincian tertentu setiap ilustrasi. (Holsti, 1970)

Turki merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki kekuatan cukup besar dan berpengaruh di kawasan tersebut. Pada posisinya, Turki memiliki kekuatan geopolitik yang menguntungkan karena dekat dengan kawasan Eropa, Asia dan Timur Tengah sehingga dalam menjalankan urusan kenegaraan, Turki pasti akan terlibat berbagai isu baik regional maupun internasional (Várhelyi, 2014)

Meskipun menjadi negara muslim mayoritas, Turki dikenal sangat menjaga hubungan baik dengan Israel selama satu dekade. Suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama negara negara lain. Hubungan kedua negara atau hubungan bilateral adalah dua belah pihak atau antara dua pihak, perjanjian dengan negara sahabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2017) Hubungan Turki-Israel dimulai pada tahun 1948 ketika Turki menjadi

negara muslim mayoritas yang pertama untuk mengakui kemerdekaan Israel. Alasan Turki mengakui kedaulatan Israel pada saat itu dikarenakan kekhawatiran Turki terhadap persebaran ideologi komunis di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan Uni Soviet dalam menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Hal lain yang perlu diketahui adalah hubungan Israel dan negara-negara Arab. Meski Israel memiliki permasalahan dengan negara-negara Arab, namun ia tidak menganggap Turki sebagai ancamannya. Hal tersebut diperkirakan karena kedekatan Turki yang pada saat itu lebih condong kepada negara Barat terutama Amerika Serikat. Menjalin hubungan dengan Israel merupakan tindakan yang paling tepat bagi Turki, hal tersebut dikarenakan Israel merupakan negara tetangga Turki yang berpihak pada Blok Barat. Sehingga dalam menghadapi ancaman persebaran pengaruh Uni Soviet Turki dapat melakukan kerja sama dengan Israel.

Turki melihat bahwa Israel adalah sekutu kuat AS dan Turki bertujuan untuk memanfaatkan Israel sebagai media bagi Turki untuk menyalurkan kepentingan mereka ke AS. Di tahun 1950-an, Turki menggunakan Israel untuk melobi AS untuk memberikan \$ 150 juta bantuan keuangan Turki dari AS dan sukses besar. Sebelumnya, ketika Turki yang bernegosiasi dengan AS, bantuan ini tidak diberikan sampai akhirnya Israel membantu proses lobi tersebut. (Berkes, 1953)

PM Israel Ben-Gurion dan PM Turki Adnan Menderes bernegosiasi dalam hal diplomatik, ekonomi, dan militer cooperation pada tahun 1958. Menjalin hubungan yang baik, Turki dan Israel melakukan kerjasama yang khususnya di bidang militer. Dalam hubungannya, kedua negara telah membuat sebuah perjanjian yaitu Military Training Cooperation Agreement (MTCA) dimana kerjasama ini dalam bidang militer (Handayani, Kebijakan Turki memutuskan Kerjasama Militer dengan Israel pada tahun 2010, 2012) Implementasi dari MTCA yaitu: pertama, latihan militer yang disebut Reliant Mermaid. Latihan ini bertujuan untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan darurat dengan prosedur Search and Rescue. Pertama kali diadakan pada tahun 1998 dan sejak tahun 2000 dijadikan sebagai agenda tahunan, terakhir kali latihan ini diadakan pada tahun 2009 Dalam kerjasama ini ada beberapa hal yang dilakukan kedua negara yaitu dengan pertukaran perwira, kunjungan delegasi militer, pertukaran informasi, pelatihan militer tiga matra, serta pemberantasan terorisme dan penjagaan perbatasan (Eisenstadt, 1997). Di antara kerjasama yang kesepakatan untuk meningkatkan perdagangan dan industrialisasi, berbagi intelijen, tindakan perencanaan darurat, dan dukungan Turki untuk militer Israel. Masa di mana hubungan Turki-Israel adalah pada puncaknya adalah di tahun 1990-an. hubungan itu tidak hanya terbuka tetapi pendalaman dalam setiap aspek. Turki dan Israel merasa perlu untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut, sehingga mereka

berdua memperkuat hubungan mereka dengan lebih sering dikunjungi seperti pada tahun 1994 dan 1996. Pada tahun 1996 Turki dan Israel menandatangani kerjasama strategis dan agreement perdagangan. Turki juga meningkatkan kebutuhan intelijen Israel untuk membantu melacak pemberontak Kurdi. Israel memasok senjata ke Turki, dan Turki diperbolehkan Israel untuk memasuki zona udara. (Boris Várhelyi)

Selain kerjasama militer, Turki dan Israel juga dilakukan kerjasama ekonomi selama 1996-1998, yang termasuk perdagangan bebas, investasi teknologi, dan kerjasama ilmiah. Kerjasama tersebut mengakibatkan peningkatan ekonomi dan nilai perdagangan besar-besaran; 1995-2000an, ekspor Turki ke Israel meningkat 10,38 kali lipat, impor dari Israel meningkat 9,28 kali lipat, dan volume perdagangan kedua negara meningkat 9,93 kali lipat. Dari sektor pariwisata, jumlah wisatawan Israel mengunjungi Turki juga meningkat setiap tahunnya dari 235.000 di 1996-2000, untuk 324.000 di 2000-2006, dan akhirnya mencapai 500.000 pada tahun 2007-2008.

Pada tahun 2009 ketika Israel melancarkan serangan langsung terhadap wilayah Gaza, Turki menyatakan berbeda pandangan terhadap kebijakan tersebut. Bahkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan simpati terhadap rakyat Palestina setelah terjadi demonstrasi oleh publik secara besar-besaran di wilayah Turki untuk bersimpati terhadap serangan Israel ke Gaza. Pada 31 Mei 2010, ketika sebuah kapal berbendera Turki yang membawa bantuan logistik untuk rakyat Gaza di Palestina mengalami penghadangan oleh pasukan Angkatan Laut Israel di wilayah laut Gaza. Bahkan, penghadangan yang lebih tepat disebut sebagai penyerangan militer terhadap sipil menyebabkan sembilan orang meninggal termasuk sembilan warga Turki (Jones, D. 2010)

Kebijakan luar negeri Turki pada 2010 adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel terkait insiden Mavi Marmara. Insiden Mavi Marmara terjadi pada tahun 2010 dimana Mavi Marmara adalah sebuah armada yang mengangkut bantuan bagi penduduk Gaza, Palestine. (Henry J. Barkey, 2011) Di dalam kapal tersebut berisi berbagai aktivis kemanusiaan dari berbagai dunia yang diserang oleh pasukan Israel sebelum sampai di Gaza yang menewaskan beberapa orang termasuk warga negara Turki. Insiden ini menjadi sorotan internasional karena menganggap Israel melanggar hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. (Davutoglu, 2014)

Disatu sisi, Keberanian pemerintah Turki pada pemerintahan Erdogan dalam memutuskan kerjasama militer dengan Israel merupakan sebuah keputusan yang akan berdampak pada hubungan bilateralnya dengan Israel. Disisi lain jika suplai peralatan militer Turki terhenti, hal tersebut akan berdampak pada kekuatan militer Turki itu sendiri. Seperti yang selama ini terjadi, kekuatan militer Turki kerap menjadi ancaman terhadap pemerintahan. Jika suplai

peralatan militer terhenti, secara otomatis hal tersebut akan mengganggu kepentingan militer Turki secara nasional. Dampaknya adalah pemerintahan Erdogan yang mengambil keputusan pemutusan hubungan industri militer tersebut akan penggulingannya pemerintah Turki sebelumnya. Turki juga dilarang Israel menggunakan zona udara untuk melakukan latihan militer dan operasi. Pada tanggal 18 Juni 2010, Turki menghentikan kerjasama militer dengan Israel. Pada 2 September 2011, Turki mengambil tindakan tegas untuk mengusir dan menyatakan *persona non grata* terhadap Duta Besar Israel, bersama dengan diplomat senior yang seluruh dan menurunkan status hubungan diplomatik menjadi Sekretaris tingkat 2.

Melalui penjelasan diatas, Saya sebagai penulis akan mencari tau serta akan menjelaskan mengapa akhirnya Turki memutuskan hubungan Diplomatiknya dengan Israel, yang sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang menguntungkan ketika mereka Bersatu dan menjadi sekutu. Dengan adanya tuntutan-tuntutan yang di berikan Turki kepada Israel, agar mereka masih bisa Bersama menjalin hubungan diplomatic, namun Israel malah mengacuhkan hal tersebut yang membuat Turki murka dan akhirnya memutuskan hubungan diplomatik mereka, walaupun masih ada satu dan lain hal yang masih terjalin diantara mereka.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang saya paparkan pada latar belakang, diketahui bahwa Hubungan Turki-Israel dalam beberapa tahun ini mengalami dinamika yang cukup signifikan terutama pasca insiden Mavi Marmara. Hubungan keduanya terus mengalami perbaikan dan terus menunjukkan kedekatannya dalam beberapa kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi di Kawasan Timur Tengah, Turki-Israel memiliki kekuatan serta pengaruh yang kuat ketika mereka menjalin hubungan. Namun tiba-tiba hubungan tersebut berubah, Maka dari itu, penulis ingin mengetahui: **Mengapa Turki memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara pasti alasan akhirnya Turki memutuskan hubungan Diplomatiknya dengan Israel yang sebenarnya bisa untuk tidak diputuskan.

D. Defenisi Konseptual dan Operasional

1. Defenisi Konseptual

a) Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik adalah sebuah hubungan yang dimana dibangun dan dilakukan oleh kedua buah negara yang dimana dilakukan dengan bantuan berbagai macam alat perlengkapan dari sebuah negara yang dimana biasanya disebut dengan sebutan utusan / perwakilan negara / perwakilan diplomatik atau yang disebut dengan diplomatik mission. Kemudian, dalam sebuah hubungan tersebut kemudian dari perwakilan negara tersebut kemudian melakukan sebuah tindakan yang dimana beratas namakan sebuah nama maupun atas tanggung jawab dari sebuah negara.

b) Persona non Grata

Persona non grata adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional. Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau Negara

c) Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.

2. Defenisi Operasional

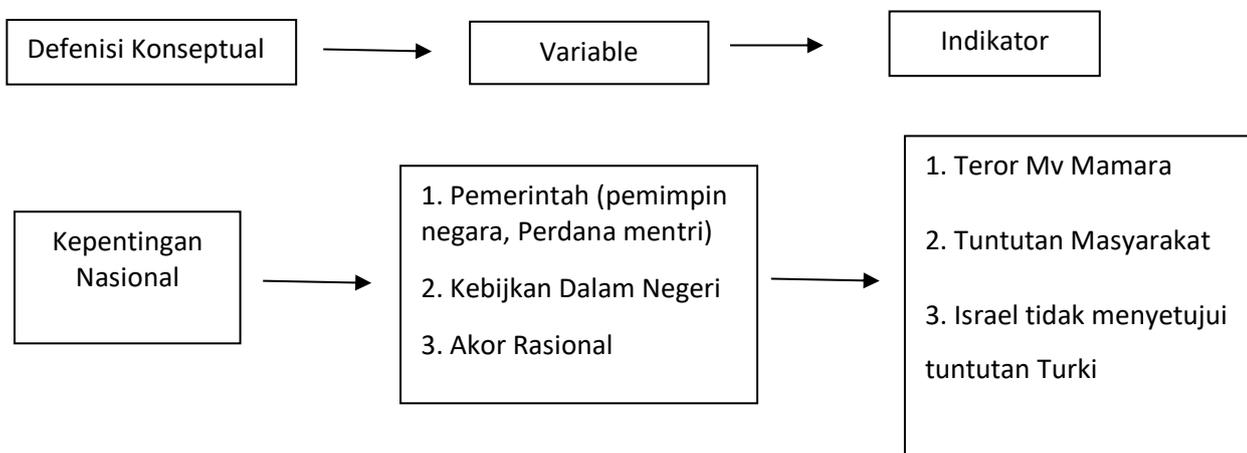


Figure 1 Defenisi Operasional

E. Literature Review

Untuk menjawab pertanyaan tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik Turki dengan Israel, maka penulis akan mereview beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia sebagai berikut:

Table 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Pendapat Reviewer	Hubungan dengan Thesis
1.	Cizre, U. (2008).	Secular and Islamic Politics in Turkey: The making of the Justice and Development Party.	Interaksi antara Islamisme dan kekuasaan sekuler akan ditentukan oleh pilihan pemimpin yang disengaja dan dihitung oleh konfigurasi kekuatan politik berpengaruh pada regional dan internasional	Buku ini merupakan sumber tambahan yang menjelaskan bentrokan dan harmoni sistem Islam dan sekuler dalam politik Turki. Terutama, buku ini berkaitan dengan bagaimana Partai Keadilan dan pembangunan menghasilkan kebijakan publik. Sumber ini akan digunakan untuk memberikan informasi dan latar belakang tentang korelasi dari sistem Islam dan sekuler dalam kebijakan Turki memutus ikatan diplomatik dengan Israel (jika ada). Oleh karena itu, sumber ini agak bisa bertahan lama sampai akhir atau hanya dapat digunakan untuk menyediakan beberapa analisis latar belakang.
2.	Aybars Görgülü dan Sabiha	Energy Relations Between Turkey and Israel	Penelitian ini berisi tentang Turki dan Israel masing-masing telah melakukan kerjasama dalam berbagai	Dengan adanya penelitian ini, penulis bisa tau ternyata kerjasama antara Turki dan Israel itu memang nyata adanya

	<p>Senyücel Gündoğar, (Research and Innovation programme under grant agreement,2016)</p>		<p>hal salah satunya adalah dibidang energi. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Israel adalah salah satu negara yang memiliki potensi dalam hal energi berupa gas. Bahkan dijelaskan bahwa Israel akan mampu mengekspor gas dengan jumlah yang besar</p>	<p>dan sangat menguntungkan satu sama lain yang memperjelas hubungan mereka dalam bidang ekonomi.</p>
<p>3.</p>	<p>Ni Luh Desriana Utami</p>	<p>Dampak Peristiwa Mavi Marmara terhadap Hubungan Diplomatik Turki Israel</p>	<p>Kerjasama di beberapa bidang seperti budaya mengalami kemunduran akibat ketegangan hubungan kedua negara sedangkan bidang militer yang menjadi pengikat kedua negara sejak lama bahkan terhenti sesuai dengan keputusan Turki. Israel mengalami kerugian paling nyata karena produksi di bidang militer merupakan pemasukan terbesar bagi pendapatan negaranya dan karena Turki salah satu negara importir tetap sejak kesepakatan tahun 1996. Selain itu Israel harus mencari konsumen lain bagi industri senjatanya dan Turki harus mencari</p>	<p>Dengan adanya jurnal ini, saya sebagai penulis bisa tau keputusan Turki memutuskan hubungannya dengan Israel membawa dampak buruk bagi keduanya.</p>

			partner sebagai pengganti Israel.	
4.	Charles R. Beitz, 1968	Political Theory and International Relations, New Jersey: Princeton University Press	Sesuai dengan namanya, “realism” bertujuan untuk menjelaskan HI “apa adanya” (as it is) dengan pandangan dunia Hobbesian yang “anarkis”, self-governed, selalu dihantui oleh kecurigaan, rasa was-was diserang, dan oleh karenanya negara bersifat anarkis dalam politik internasional	Pandangan ini melihat bahwa “kepentingan nasional” harus dilihat dari kepentingan negara karena sejak 1648, “negara” adalah supremasi politik tertinggi di masyarakat dan “anarkisme” dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi melalui negara
5.	Qureshi, Y. (1977)	A Review of Tukey's Foreign Policy. Pakistan Horizon, 54-71.	Jurnal yang ditulis oleh Yasmin Qureshi adalah tentang bagaimana masa lalu kebijakan luar negeri Turki bekerja dan apakah itu mempengaruhi situasi pada saat ini. Namun, sumber ini diterbitkan di Pakistan dan mungkin mengandung lebih sedikit informasi dibandingkan dengan sumber lain yang diterbitkan di Turki atau Israel sendiri.	Yasmin Qureshi ini akrab dengan politik dan gagasan Islam, oleh karena itu tulisannya akan sangat dipengaruhi dalam pemikirannya tentang bagaimana gagasan Islam membentuk kebijakan luar negeri dari negara mayoritas Muslim seperti Turki.
6.	Erkin, F. C. (1952)	Turkey's Foreign Policy. Proceedings of the	Feridun C. Erkin adalah duta besar Turki untuk Amerika Serikat pada waktu	Sumber ini hanya akan digunakan untuk memberikan informasi latar belakang dari

		Academy of Political Science	itu. Pengalamannya sebagai seorang duta besar akan memberikan penjelasan dari perspektif diplomatik, penuh diskusi tentang kepentingan negara dan birokrasi diplomatik.	hubungan diplomatik Turki-Israel di masa lalu. Paling banyak, sumber ini dapat memberikan perbandingan dan implikasi pada bagaimana hubungan masa lalu mempengaruhi situasi saat ini, mungkin beberapa pola diulang.
7.	Hans J. Morgenthau	Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.	Dalam soal keamanan, banyak teoretisi HI berdebat tentang bagaimana memersepsikan “ancaman” terhadap negara, yang berarti juga adalah “gangguan” terhadap kepentingan nasional. Mereka yang dipengaruhi oleh cara berpikir “realis” tentu akan menekankan “ancaman” sebagai sesuatu yang berpotensi mengacaukan stabilitas negara. Bagi mereka, sesuatu bisa dikategorikan sebagai ancaman jika ia mengganggu stabilitas negara, baik eksternal maupun internal. Pendekatan untuk merespons keamanan ini, sebagai konsekuensinya, mengedepankan deterrence	Bagi perspektif ini, kategorisasi ancaman melekat pada sesuatu yang menghalangi pemenuhan hak-hak manusia untuk freedom from fear dan freedom from want

			dan balance of power yang erat kaitannya dengan use of military forces.	
8.	Arbell, D. (2014)	The U.S.-Turkey-Israel Triangle. Washington, D.C.: Brookings Press.	Pada tahun 1950, Turki memprioritaskan Israel untuk sukses besar di melobi AS untuk memberikan Turki US \$150 juta bantuan keuangan. Sebelumnya, ketika secara bilateral bernegosiasi dengan AS, bantuan ini tidak diberikan, sampai akhirnya Israel sukses dalam membantu melobi AS.	Buku ini akan digunakan sebagai sumber tambahan untuk menunjukkan dampak US dalam hubungan Turki-Israel. Buku ini juga memberikan penelitian yang cukup mendalam tentang bagaimana AS memperlakukan kedua sekutu di Timur Tengah, yang agak berbeda satu sama lain.
9.	Finy Diasari Murti	Hubungan Diplomatik Turki-Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Periode 2010-2013	Dalam hubungan Turki dan Israel, pasca Mavi Marmarah hubungan yang terburuk sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Terlebih dalam kerjasama yang sudah di jalin, di bekukan juga secara sepihak oleh Turki.	Skripsi ini memberikan alternatif lain sebagai bahan acuan bagi penulis pada saat insiden mavi marmara itu terjadi dan dampak bagi kedua negara.
10.	Ahmad Fauzi	Propaganda Turki terhadap Israel	Dalam jurnal ini, yang berceritakan tentang insiden mavi marmara dimana pasukan Israel menyerang armada mavi marmara. Propaganda sebagai sebuah	Turki memberikan pandangan terhadap Israel yang dimana Turki mempengaruhi negara-negara lain khususnya kawasan Timur Tengah dengan propaganda melalui film yang

			<p>soft diplomacy yang bertujuan untuk mempengaruhi negara lain. Sudah sejak lama, Turki dan Israel memiliki hubungan yang penuh dengan dinamika tetapi tidak menyurutkan keduanya untuk berpandangan yang sama terhadap barat. Tetapi atas terjadinya insiden mavi marmara, secara sepihak Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel terkait dengan tewasnya warga negara Turki atas penyerangan yang dilakukan Israel.</p>	<p>dibuat oleh Turki terkait insiden mavi marmara. Jurnal ini sangat memiliki kontribusi bagi penulis sebagai bahan acuan dimana Turki bersikeras membela Palestine dengan terus mendukung kemerdekaan bagi Palestine serta membuat negara-negara islam ikut mendukung Palestine</p>
11.	<p>Karen Kaya (FMSO Publications, United States, 2013)</p>	<p>Turkey and Israel in New Middle East</p>	<p>Jurnal ini memprediksi bagaimana hubungan antara Turki dan Israel kedepannya. Berbagai penghinatan yang pernah dilakukan oleh Israel terhadap Turki tidak akan menjadikan hubungan kedua negara seperti pada masa Ataturk, karena militer Turki tidak lagi mendapatkan suara dalam kebijakan luar negeri layaknya pada masa sekulerisasi era Ataturk.</p>	<p>Penelitian tersebut masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena dapat menjawab pula apakah prediksi tersebut telah terjadi atau belum,serta melihat bagaimana hubungan diplomatik kedua negara tersebut</p>

12.	Wang Bo	A Research on the Causes of Turkey-Israel Discord.	Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab renggangnya hubungan kedua negara.	Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini membahas alasan kebijakan luar negeri kedua negara dan berujung pada imbas hubungan keduanya.
-----	----------------	--	--	--

Dalam Propaganda Turki terhadap Israel oleh Ahmad Fauzi yang di muat dalam e-Jurnal menunjukkan bahwa Turki memberikan pandangan terhadap Israel yang dimana Turki mempengaruhi negara-negara lain khususnya kawasan Timur Tengah dengan propaganda melalui film yang dibuat oleh Turki terkait insiden mavi marmara. Hal ini tidak hanya mendapat respon dari negara di kawasan Timur Tengah tetapi juga negara barat merespon apa yang di lakukan oleh Turki tersebut. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang merespon pasca insiden Mavi Marmara, terutama seperti yang dikisahkan dalam film Valley of the Wolves: Palestine, pihak Amerika Serikat justru menjadi sedikit menjauh dari Israel. Selain karena banyaknya warga Amerika Serikat yang berunjuk rasa turun ke jalan, Presiden Obama sendiri juga sangat menyayangkan kejadian itu karena beberapa dari relawan di kapal tersebut merupakan warga negara Amerika Serikat. Dalam jurnal ini, yang berceritakan tentang insiden mavi marmara dimana pasukan Israel menyerang armada mavi marmara. (Harian Suara Karya, 2010)

Propaganda sebagai sebuah soft diplomacy yang bertujuan untuk mempengaruhi negara lain. Sudah sejak lama, Turki dan Israel memiliki hubungan yang penuh dengan dinamika tetapi tidak menyurutkan keduanya untuk berpandangan yang sama terhadap barat. Tetapi atas terjadinya insiden mavi marmara, secara sepihak Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel terkait dengan tewasnya warga negara Turki atas penyerangan yang dilakukan Israel. Oleh karena itu, film ini bertujuan sebagai propaganda Turki untuk melawan Israel dan mendukung kemerdekaan yang diharapkan oleh negara Palestina.

Dalam film ini juga Turki mengajak negara-negara Islam yang terlibat untuk mengecam Israel dan memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, Film ini juga bertujuan untuk memberikan sebuah tindak lanjut dari Turki terhadap insiden Mavi Marmara

yang banyak menewaskan warga negara Turki. Tidak hanya itu, ada sesuatu yang ingin dilakukan Turki yaitu kepentingan Turki untuk menciptakan pengaruhnya di Timur Tengah. Jurnal ini sangat memiliki kontribusi bagi penulis sebagai bahan acuan dimana Turki bersikeras membela Palestine dengan terus mendukung kemerdekaan bagi Palestine serta membuat negara-negara islam ikut mendukung Palestine. Salah satu hal yang penting adalah hubungan diplomatik Turki dan Israel.

Dalam skripsi yang berjudul Hubungan Diplomatik Turki-Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Periode 2010-2013 yang ditulis oleh Finy Diasari Murti dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, menyebutkan bahwa Turki sebagai negara Islam pertama yang mengakui kemerdekaan negara Israel pada tahun 1949. Akan tetapi pada 2010, terjadinya insiden Mavi Marmara yang disebabkan oleh tentara Israel menyerang kapal yang membawa misi kemanusiaan ke Jalur Gaza membuat Turki secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan menarik Duta Besarnya. Dalam hubungan Turki dan Israel, pasca Mavi Marmara lah hubungan yang terburuk sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Terlebih dalam kerjasama yang sudah di jalin, di bekukan juga secara sepihak oleh Turki. Skripsi ini berkontribusi sebagai bahan acuan bagi penulis pada saat insiden mavi marmara itu terjadi dan dampak bagi kedua negara. (Murti, Hubungan Diplomatik Turki-Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Periode 2010-2013 , 2016)

Dalam jurnal Dampak Peristiwa Mavi Marmara terhadap Hubungan Diplomatik Turki Israel oleh Ni Luh Desriana Utami Universitas Jember (UNEJ) menjelaskan bagaimana keputusan Turki memutuskan hubungannya dengan Israel membawa dampak buruk bagi keduanya. Kerjasama di beberapa bidang seperti budaya mengalami kemunduran akibat ketegangan hubungan kedua negara sedangkan bidang militer yang menjadi pengikat kedua negara sejak lama bahkan terhenti sesuai dengan keputusan Turki. Israel mengalami kerugian paling nyata karena produksi di bidang militer merupakan pemasukan terbesar bagi pendapatan negaranya dan karena Turki salah satu negara importir tetap sejak kesepakatan tahun 1996. Selain itu Israel harus mencari konsumen lain bagi industri senjatanya dan Turki harus mencari partner sebagai pengganti Israel. Sebagai partner di kawasan Timur Tengah, Israel harus mencari pengganti Turki. Dan lebih sulitnya lagi ketika Turki menarik duta besar dari Israel, saat itu Israel pun kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan Turki. (Utami)

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Regional Security Complex

Regional Security Complex adalah teori yang menekankan perhatiannya pada signifikansi unsur regional atau kawasan dalam memahami pembentukan regional security complex. Security complex yang dikemukakan oleh Buzan sebagai sebuah perkumpulan negara yang karena satu dan hal yang lain memiliki kedekatan yang lantas membuat primary security negara-negara tersebut tergabung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Definisi dalam teori kawasan dalam teori regional security complex lebih di lihat dari keamanan sehingga suatu wilayah di definisikan berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap isu keamanan.

Regional Security Complex (RSC) di tetapkan oleh pola persahabatan dan permusuhan (Pattern of amity and enmity) yang telah bertahan lama dalam konteks subglobal (pola geografis dari saling ketergantungan keamanan). Dalam struktur internasional yang anarki, struktur pokok dan karakter RSC di definisikan melalui dua macam hubungan, yaitu power relation dan pattern of amity and enmity. Dimana power bekerja dalam skala regional terdapat dalam konsep regional balance of power dimana power yang tidak berhubungan satu sama lain tetap memiliki pengaruh dalam jaringan hubungan-hubungan yang sama.

Pattern of amity and enmity secara historis berasal dari realita yang secara sosial terkonstruksi dalam dimensi-dimensi struktur. Kriteria mengenai amity dan enmity diantara unit-unit ini adalah hal yang krusial dimana meningkatnya enmity diantara unit-unit dalam security complex yang akan menghasilkan sebuah konflik. Sedangkan jika amity yang meningkat maka security community yang akan muncul. Suatu security community dalam suatu kawasan membutuhkan pengakuan dari negara-negara di kawasan tersebut.

Pada dasarnya, saling ketergantungan keamanan cenderung untuk menjadi fokus Regional. Kekuatan super memiliki kepentingan seperti luas, dan kemampuannya yang besar seperti itu, bahwa mereka dapat melakukan ries saingan mereka atas seluruh planet. Adikuasa oleh definition sebagian besar melampaui geografi dan dekat dalam hubungan keamanan mereka. Kepemilikan kekuatan besar cenderung naik dan menjadi kekuatan regional yang paling penting. Negara-negara yang lebih kecil biasanya akan bergabung dengan tetangga mereka, besar kekuatan biasanya akan menembus beberapa daerah yang berdekatan, dan negara adidaya akan memiliki pengaruh yang lebih. Ancaman dapat dilihat berasal dari kekuatan-kekuatan besar yang jauh, tapi ini tidak selalu, atau bahkan biasanya karena memiliki ketergantungan keamanan pada sebuah negara yang bisa menjadikan sebuah ancaman.

Pola amity dan permusuhan ini biasanya paling difahami oleh mulai analisis dari tingkat regional, dan memperluas ke arah masuknya aktor global di satu sisi dan faktor domestik di sisi lain. Pola specific yang di takutkan yang umumnya tidak diimpor dari tingkat sistem, tetapi dihasilkan secara internal di wilayah oleh sejarah, politik, dan kondisi-kondisi material. Untuk sebagian besar negara-negara dalam sistem Internasional, tingkat regional adalah krusial untuk analisis keamanan. Untuk kekuatan-kekuatan global, tingkat regional sangat penting dalam membentuk kedua pilihan, dan konsekuensi, memproyeksikan pengaruh dan persaingan ke dari sistem. Tingkat regional yang paling penting untuk negara-negara di dalamnya, tetapi juga secara substansial untuk kekuatan-kekuatan global. Fitur keamanan di tingkat daerah tahan lama. Dalam substansial mandiri tidak dalam pengertian yang benar-benar berdiri bebas, tetapi lebih pada memiliki keamanan dinamis yang akan ada bahkan jika aktor-aktor lain melakukan tidak menimpa pada itu.

Fungsi yang paling penting untuk RSCT adalah sebagai kerangka kerja organisasional dalam studi empiris keamanan regional. Teori ini menentukan apa yang harus dicari pada empat tingkat analisis dan bagaimana saling mengaitkannya.

Keempat level tersebut adalah (Barry Buzan dan Ole Weaver.2003):

1. Di dalam negara bagian, terutama kerentanan yang dihasilkan di dalam negeri (apakah negara kuat atau lemah karena stabilitas tatanan domestik dan korespondensi antara negara dan negara. Kerentanan spesifik suatu negara menentukan jenis Ketakutan keamanan yang dimilikinya dan terkadang membuat negara bagian atau kelompok negara lain memiliki ancaman struktural bahkan jika mereka tidak memiliki niat bermusuhan.

2. Hubungan negara-ke-negara (yang menghasilkan daerah seperti itu).

3. Interaksi kawasan dengan daerah tetangga (ini seharusnya relatif terbatas mengingat kompleks tersebut didefinisikan oleh interaksi secara internal menjadi lebih penting. Tetapi jika perubahan besar dalam pola saling ketergantungan keamanan yang mendefinisikan kompleks sedang berlangsung, tingkat ini dapat menjadi signifikan , Dan dalam situasi asimetris kotor, kompleks dengan kekuatan global yang menopang satu dengan kekuatan global dapat memiliki hubungan antar wilayah yang kuat dalam satu arah); Dan akhirnya

4. Peran kekuatan global di wilayah ini (saling mempengaruhi antara struktur keamanan global dan regional).

2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan bagian dari politik luar negeri dimana untuk mencapai dan memenuhi kebutuhannya, negara akan melakukan suatu hubungan dengan negara lain seperti kerjasama. Dalam teori kepentingan nasional, ketika kepentingan negara sudah terpenuhi, maka akan terciptanya stabilitas di negara tersebut. Tokoh yang sangat terkenal yang menciptakan teori ini adalah Hans Morgenthau. (Morgenthau, *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*, 1973)

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. “Kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan-keinginan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dalam negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya.” (Olton, 1999)

Kepentingan nasional ini sangat penting guna memahami bagaimana perilaku internasional berjalan. Salah satu kiblat bagi perumus kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional suatu negara. Dalam pandangan realisme, kepentingan nasional akan selalu dikaitkan dengan power yang mana power memegang peranan penting dalam roda hubungan internasional. Sebagai sesuatu yang dirumuskan secara rasional, kepentingan nasional bersifat seperti hukum yang artinya harus dipatuhi oleh negara dalam bentuk kewajiban. Kewajiban yang di maksud berupa perlindungan identitas fisik, politik, dan kebudayaan negara dari gangguan negara lain. Dalam teori kepentingan nasional, ketika kepentingan negara sudah terpenuhi, maka akan terciptanya stabilitas di negara tersebut. Konsep kepentingan nasional diperlukan untuk menjelaskan bagaimana perilaku negara dalam sistem internasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional menjadi hal yang utama untuk perumusan suatu kebijakan luar negeri. Konsep kepentingan nasional diperlukan untuk menjelaskan bagaimana perilaku negara dalam sistem internasional. Sedangkan dalam kaitannya dengan sifatnya yang fleksibel, kepentingan nasional dapat diubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan rakyat pada saat itu

Dalam konsep kepentingan nasional ini bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional yang dimana pencapaian kepentingan nasional di pengaruhi oleh lingkungan internasional. Kepentingan nasional juga harus melampaui kepentingan yang

bersifat partikularistik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.

Adanya tiga pendekatan untuk memahami kepentingan nasional:

- Pendekatan elitis dimana penentuan kebijakan sebagai kepentingan nasional khususnya dalam kebijakan luar negeri yang sangat tergantung pada pemerintahan.

- Paham bahwa kepentingan nasional harus didasarkan pada sifat alami hubungan internasional dan tujuan negara. Dalam hal ini dimana pemikiran bahwa anarki membuat keamanan menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan negara sehingga membutuhkan keberadaan manajemen kekuatan yang rasional serta kebijakan yang sejalan dengan pemahaman ini yang dapat memenuhi kriteria sebagai kepentingan nasional.

- Pemahaman bahwa kepentingan nasional merupakan hasil dari proses politik yang memiliki nilai normatif dan independen yang melalui prosedur demokratis. Kepentingan nasional hanya dapat ditentukan oleh standar masing-masing negara. Ketika tidak adanya nilai kepentingan yang bersifat demokratis, maka hubungan antara kebijakan luar negeri dengan kepentingan nasional tidak dapat ditentukan. (Yanyan M. Yani, 2017)

Pada pendekatan ketiga adalah pemahaman bahwa kepentingan nasional merupakan hasil dari proses politik yang memiliki nilai normatif yang independen, dimana melalui proses demokratis. Dengan pendekatan ini, kepentingan nasional hanya dapat ditentukan oleh standar masing-masing negara. Ketika dihadapkan pada ketiadaan penilaian kepentingan yang berdasarkan proses demokratis, maka hubungan antara kebijakan luar negeri dengan kepentingan nasional tidak dapat ditentukan.

3. Kebijakan Luar Negeri

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah tindakan otoritas pemerintah yang dilakukan guna mempertahankan kepentingan yang dimiliki atau merubah kepentingan tersebut di kalangan internasional. (Dugis, 2007) Sedangkan menurut Breuning, kebijakan luar negeri adalah totalitas kebijakan negara pada interaksi dengan lingkungan di luar perbatasan suatu negara (MacMillan, 2007) Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri berlandaskan pada tujuan nasional suatu negara yang berpengaruh pada masyarakat. Kebijakan luar negeri dapat berupa statement yang jika dilakukan tindak lanjut akan menjadi kebijakan luar negeri yang tertulis atau dilakukan. Kebijakan luar negeri menurut sifatnya dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri positif dan negatif. Kebijakan luar negeri

negatif cenderung diartikan sebagai kebijakan luar negeri yang merespon negara lain dengan kebijakan yang semakin membuat hubungan kedua negara tidak baik atau bukan memberikan solusi. Misalnya saja kecaman, sindirian, penyerangan, perang, pemutusan hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan luar negeri positif adalah kebijakan luar negeri yang cenderung mengarah pada solusi atau perbaikan seperti kerjasama, pemulihan hubungan diplomatik dan lain sebagainya (Boris Várhelyi)

Foreign Policy atau Kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai salah satu hal penting yang yang mengantarkan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri pun bisa dikatakan sebagai salah satu cara suatu negara untuk berkomunikasi dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial-budaya dan keamanan. Menurut Holsti, kebijakan luar negeri adalah ide-ide yang dibuat atau direncanakan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah yang berakibat pada perubahan baik berupa kebijakan, sikap atau tindakan negara bagian. (International Studies Quarterly, 1970)

Apa yang dipaparkan oleh Holsti tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan luar negeri adalah satu tindakan negara guna mempertahankan dan mengupayakan kepentingan nasionalnya. Holsti menambahkan bahwa dalam melakukan analisa terhadap kebijakan luar negeri, terdapat empat sifat dasar dari kebijakan luar negeri. Pertama adalah Foreign Policy Orientation yakni sifat kebijakan luar negeri yang menunjukkan tingkah laku sekaligus komitmen suatu negara pada lingkungan internasionalnya sehingga mengeluarkan kebijakan yang dianggap sebagai strategi. Hal ini berkaitan erat dengan fokus yang menjadi kepentingan nasional suatu negara yang diimplementasikan dengan kebijakan luar negeri. (Holsti, 1970)

Kedua adalah role, yakni kebijakan luar negeri memiliki sifat mendukung peran negara perihal keterkaitannya dalam hubungan internasional. Sifat ini berkaitan erat dengan bagaimana citra negara terutama dalam menghadapi berbagai kondisi sekaligus isu. Kebijakan yang dikeluarkan suatu negara akan menunjukkan bagaimana posisi suatu negara dalam pergaulan internasional. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan antar negara yang terjalin.

Ketiga adalah goal yang berarti bahwa kebijakan luar negeri akan selalu berisi tujuan tertentu yang tentu saja untuk mengamankan sekaligus mendapatkan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengaruh suatu negara terhadap negara lain menjadi salah satu modal penting guna mendapatkan apa yang ingin di capai. Suatu negara tidak mungkin menjalin hubungan jika kesepakatan yang terjalin tidak saling menguntungkan. Oleh karena

itu sebelum menjalin kerjasama dengan negara lain, suatu negara akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Keempat adalah action, yang berarti sifat kebijakan luar negeri akan berhubungan dengan aksi yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau dipertahankan. (Hall, 1983)

Implikasi dari kepentingan nasional adalah kebijakan luar negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah perpanjangan tangan dari kepentingan nasional. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya direalisasikan dengan tindakan, kecaman dan kritikan sudah bisa dianggap sebagai kebijakan luar negeri. Pemaparan dari Holsti memberikan gambaran bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal yakni kepentingan nasional berupa ekonomi dan keamanan, faktor eksternal seperti keadaan politik internasional. Kedua faktor ini harus dapat dikondisikan dengan baik sehingga terciptalah kebijakan luar negeri yang sesuai.

4. Model Aktor Rasional dalam Teori Pilihan Rasional

Model Aktor Rasional dalam Teori Pilihan Rasional Teori pilihan rasional adalah teori yang membahas perihal penyebab suatu fenomena terjadi dengan kata lain aktor yang membuat kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan, pemikiran, dan variabel lainnya. Aktor yang dimaksud adalah negara yang tentu saja berhubungan dengan bagaimana negara tersebut bertahan sekaligus menjamin kesejahteraan rakyatnya. (SAGE Publications, 2002)

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh James S. Coleman, yang mengatakan bahwa dalam proses kebijakan luar negeri sumber yang berperan adalah aktor dan sumber daya. Artinya aktor berperan mengelola dan mencari sumber daya yang dimiliki. (Researchgate, 23, 4, 1994). Namun menurut Coleman, aktor yang dimaksud adalah kelompok atau individu yang disebut sebagai pemerintah yang menjadi aktor dalam pembuat keputusan untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga untuk mendapatkan rasionalitas dari tindakan atau kebijakan suatu negara dapat dilakukan dengan menafsirkan keputusan berdasarkan pada kejadian yang berkaitan dengan negara tersebut. (Second Edition. Longman, Inc; 2000)

Dalam teori pilihan rasional, pertimbangan pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan pertimbangan keuntungan maksimal yang dapat didapatkan. Apabila

individu dan kelompok yang menjalankan pemerintahan mampu mendapatkan kepentingannya, maka hal tersebut berlaku pula bagi negara. Karena pada hakikatnya, negara dijalankan oleh individu dan kelompok yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan. Posisi negara dalam teori pilihan rasional dalam konteks hubungan internasional adalah negara sebagai aktor utama.

Pada hakikatnya negara adalah sebuah kesatuan kelompok yang didalamnya terdiri dari berbagai organisasi yang bersifat ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Artinya pemimpin organisasi atau pejabat politik membuat keputusan atas nama negara adalah keputusan atas nama kelompok yang selanjutnya menjadi kebijakan negara. Mereka adalah aktor yang segala keputusannya dikeluarkan menjadi atas nama negara. Dengan demikian, presiden, menteri dan pejabat lainnya membuat dan melaksanakan keputusan tentu saja atas nama negara. Dalam konteks tersebut, negara dipandang memiliki sikap dalam membuat keputusan atau kebijakannya. Keputusan yang diambil adalah cerminan dari sikap negara. Model ini dipilih oleh peneliti karena dapat membantu guna menganalisa data yang didapatkan oleh peneliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah seperti yang diharapkan. Konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional digunakan peneliti untuk mencari tahu motif atas kebijakan luar negeri Turki untuk Israel dalam bidang kemanan. Begitu pula teori pilihan rasional yang digunakan peneliti untuk menganalisa keuntungan dan alasan Turki atas kebijakannya. Teori pilihan rasional dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri menurut Graham T. Allison, terdapat tiga model dalam membuat kebijakan luar negeri yakni Rational Model, Organization Model, dan Beureaucratic Model. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan rational model guna menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti.

Dalam Rational Model, negara adalah aktor satu-satunya yang membuat kebijakan. Terdapat tiga komponen dalam pengambilan keputusan melalui model rasional ini yaitu tujuan, pilihan, dan konsekuensi. Faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah ekonomi politik. (Manchester University Press, 2004) Terdapat tiga kriteria suatu keputusan dianggap sebagai keputusan yang rasional. Pertama, landasan aktor untuk membuat kebijakan adalah kepentingan nasional atau tujuan dari negaranya. Kedua adalah jika terdapat beberapa pilihan, maka pembuat kebijakan harus mampu memilih pilihan tersebut berdasarkan keuntungan sekaligus konsisten terhadap pilihannya. Ketiga adalah mampu memaksimalkan pilihan yang telah dipilih sehingga keuntungan yang didapat mampu dimaksimalkan pula. Tujuan menganalisa dengan

rational model adalah melihat hubungan antara tujuan negara dan kebijakan luar negeri yang akan diambil. Apabila kebijakan yang diambil mampu mengantarkan negara untuk mendapatkan tujuannya maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang rasional. Model rasional dipilih ketika suatu negara tidak mengetahui kondisi domestik negara lain. Pada dasarnya mengetahui tujuan nasional negara lain akan mempermudah suatu negara untuk dapat memprediksi kebijakan yang akan diambil oleh negara lain. Hal lain yang menjadi bahan pertimbangan adalah situasi yang sedang terjadi.

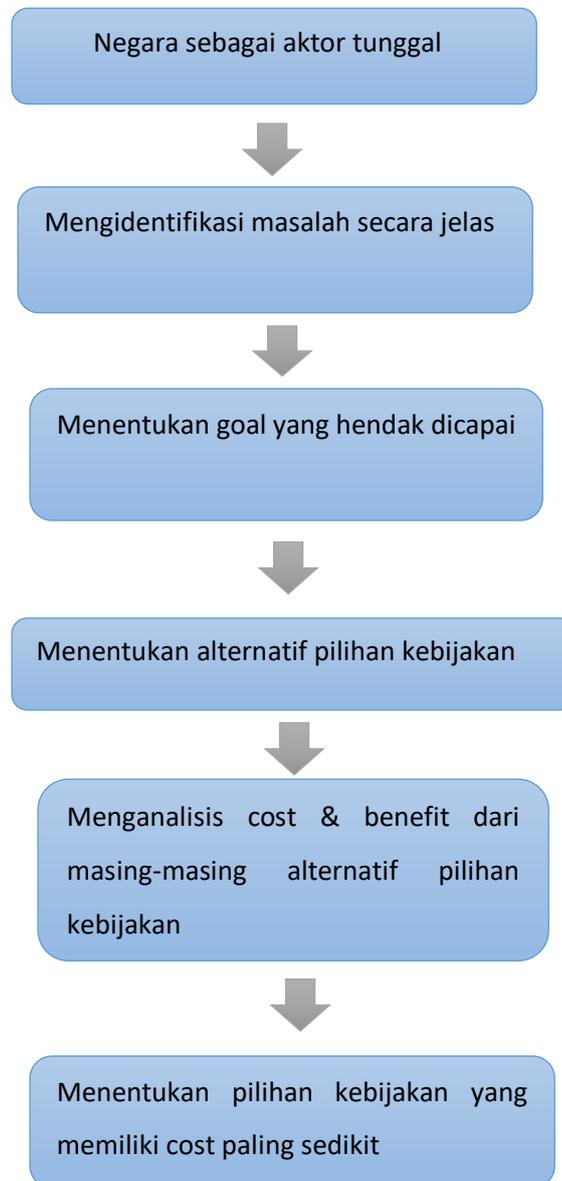


Figure 2 The Rational Model of Decision Making

Teori ini digunakan oleh peneliti karena di dalam teori tersebut menjelaskan bagaimana sifat dasar kebijakan luar negeri, kriteria sekaligus tujuan dari kebijakan luar negeri. Sehingga,

peneliti akan merasa terbantu guna menganalisa langkah yang diambil oleh Turki untuk merepon Israel. (Mingst, 2003)

G. Hipotesa

Untuk menjelaskan mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab renggangnya hubungan kedua negara antara Turki dengan Israel, terdapat tiga hal yang menjadi alasan utama Putusnya Hubungan Diplomatik dengan Israel pada Tahun 2011, yaitu:

1. Pengaruh ideologi pribadi sekaligus karakteristik pemimpin politik.
2. Perubahan situasi politik dan sosial yang berkembang di antara dua negara.
3. Internasionalisasi atau perubahan politik regional dan internasional akibat konflik kawasan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memandu kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam terkait isu hubungan diplomatik Turki dengan Israel. Berdasarkan kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi tersebut, dan juga setelah data dan informasi yang diperoleh dianalisis, diperoleh gambaran yang semakin jelas untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari data dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah serta berita, surat kabar, artikel, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/Internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

I. Jangkauan Penelitian

Adapun jangkauan pada penelitian ini dimulai pada tahun 1996, dimana Turki dan Israel sudah menjalin hubungan baik yang ditandai dengan adanya penandatanganan kerjasama strategis dan agreement perdagangan, namun pada tahun 2000-an, tiba-tiba Turki dilarang Israel menggunakan zona udara untuk melakukan latihan militer dan operasi lainnya. Ketika itu juga ofensif terhadap Gaza terjadi pada 2008-2009, Turki melihat situasi ini sebagai awal dari memburuknya hubungan dengan Israel. Akhirnya, pada 2010, kapal milik LSM Turki MV

Marmara diserang secara brutal oleh Angkatan Laut Israel yang melakukan blokade ke perairan Gaza untuk membatasi pemasokan untuk Gaza, menyebabkan 9 pekerja sukarela Turki meninggal dunia dan sebagian besar lainnya terluka di rumah sakit. Turki menyebut tindakan ini sebagai "negara terorisme" dan menuntut Israel untuk meminta maaf, namun tuntutan tersebut ditolak oleh Israel. Akhirnya pada tanggal 18 Juni 2010, Turki menghentikan kerjasama militer dengan Israel. Pada 2 September 2011, Dengan banyaknya persoalan yang telah dilakukan oleh Israel kepada Negara Islam, dan juga Israel tidak memiliki itikad baik dengan Turki, Akhirnya Turki mengambil tindakan tegas untuk mengusir dan menyatakan *persona non grata* terhadap Duta Besar Israel sebagai penanda bahwa berakhirnya hubungan diplomatik formal antara Turki dengan Israel.

J. Argumentasi Utama

Argumentasi utama yang diajukan oleh peneliti adalah: Peneliti berargumentasi bahwa kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pasca serangan kIsrael terhadap kapal Mv Marmara adalah lebih condong bersifat negatif karena berbentuk kecaman, sindirian, kritik dan pemutusan hubungan diplomatik. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Turki lebih banyak merugikan Turki, maka respon kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Turki wajar jika lebih banyak bersifat negatif. Respon berupa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan merupakan pilihan rasional yang tepat bagi Turki untuk mempertahankan kedaulatan dan harga diri negaranya. Segala bentuk kebijakan luar negeri yang diambil oleh Turki tentu atas pertimbangan kepentingan nasional yang dimiliki.

K. Sistematika Penulisan

Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul Pemutusan Hubungan Diplomatik Turki Terhadap Israel tahun 2011 akan disusun menjadi lima bab. Berikut akan diuraikan sistematika pembahasan pada setiap bab, yaitu:

Bab I peneliti akan memberikan gambaran awal mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti serta alasan mengapa peneliti mengangkat topik ini untuk diteliti. Setelah latar belakang, peneliti memaparkan rumusan masalah yang diajukan untuk mencari jawabannya. Selain itu akan dipaparkan pula perihal tujuan sekaligus manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah uraian mengenai definisi konseptual untuk menyamakan pengertian dari definisi setiap variable yang termasuk dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai kerangka teoritis yang akan digunakan dan juga sistematika pembahasan sebagai pedoman dan runtutan tiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II menjelaskan tentang dinamika kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel, termasuk tentang orientasi politik asing Turki sebelum pemerintahan Erdogan dan juga menjelaskan tentang hubungan yang harmonis yang pernah terjalin antara Turki dan Israel,

Bab III menjelaskan tentang perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel di 2011, termasuk tentang perubahan orientasi kebijakan luar negeri dan bukti hubungan antara Turki dan Israel akhirnya bisa terputus, untuk mencari perubahan kebijakan yang terjadi.

Bab IV menjelaskan tentang pembuktian hipotesis, juga berisi analisis tentang kebaruan kajian inidan perbedaan yang ada dibanding dengan kajian-kajian yang diteliti sebelumnya.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari tulisan ini. Kesimpulan yang dijelaskan dengan memperhatikan hipotesis dan kerangka teori yang ada.